

Pengaruh Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan

Wildayanti SD¹, Rio Monoarfa², Usman³

1,2,3. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan Keuangan di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete. Metode pada penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 39 responden yang terdiri dari Kepala Desa dan BPD. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software IBM SPSS Version 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan, (2) Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan (3) Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Transparansi dan Pencegahan Kecurangan

Copyright (c) 2023 Wildayanti SD

✉ Corresponding author :

Email Address : wwildayanti15@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD No. 8 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi mengenai gambaran suatu perusahaan. Laporan keuangan disajikan untuk para pemegang kepentingan (*stakeholder*) seperti pihak manajemen, karyawan, investor (*holder*), kreditor, supplier, pelanggan, maupun pemerintah. (Ayu, 2021)

Laporan keuangan juga sebagai alat komunikasi yang berkaitan dengan data keuangan serta aktivitas operasional perusahaan yang sangat berguna bagi para penggunanya dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas keadaan perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka.

Auditor internal bertanggungjawab dalam mendeteksi fraud yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan internal auditing. Pada saat melakukan audit, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang memiliki risiko tinggi terjadinya fraud seperti transaksi kas, rekonsiliasi bank, proses pengadaan, penjualan, dan lain-lain. Jika auditor internal menemukan suatu indikasi terjadinya fraud dalam organisasi, auditor internal harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi tersebut, seperti audit committee. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi dilakukannya investigasi yang diperlukan untuk menyelidiki fraud tersebut.

Menurut survey yang dilakukan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa data survey Fraud Indonesia di dapatkan dari kuesioner yang diberikan secara daring dan secara fisik. Total data yang terkumpul sebanyak 256, namun terdapat 17 data tidak memenuhi kriteria dan tidak memberikan informasi secara lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, total data yang diolah dan dianalisis pada survey Fraud Indonesia 2019 sebanyak 239. Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64.4 % atau dipilih oleh 154 responden. Jenis Fraud selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28.9% atau dipilih oleh 69 responden, sedangkan Fraud laporan keuangan sebesar 6.7% atau dipilih oleh 16 responden.

Demikian tidak menutup kemungkinan hal ini bisa saja terjadi di lingkungan Desa. kecurangan-kecurangan yang sering terjadi di lingkungan Desa ini dikarenakan berbagai macam faktor. Seperti kurangnya pengendalian internal dan transparansi di lingkungan Desa. Kecurangan dapat dilihat dari berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Kecurangan yang paling sering timbul di sektor pemerintahan adalah korupsi. Indikasi adanya kecurangan dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Di provinsi Sulawesi tengah tepatnya di kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo una-una, desa Tete.A. Pada laporan belanja barang dan jasa terdapat perbedaan harga pasar dengan harga yang dicantumkan di laporan anggaran. Dari penjelasan pada data dapat dilihat bahwa dipemerintah provinsi Sulawesi tengah kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo una-una, tepatnya di desa Tete.A, Menurut Sulaeman (2023) masih terdapat kecurangan selama proses penyusunan laporan anggaran belanja barang dan jasa. Harga yang dicantumkan tidak sesuai dengan harga pasar.

Sehingga diperlukan tujuan pencegahan. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu adanya pengendalian internal dan transparansi agar tujuan yang telah ditetapkan oleh *top manajemen* dapat tercapai, serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kecurangan dapat tumbuh karena adanya kesempatan untuk dapat memanfaatkan keadaan yang ada untuk melakukan penyelewengan. Kecenderungan kecurangan akuntansi, pada umumnya berkaitan erat dengan korupsi. Tindakan korupsi yang lazim dilakukan adalah manipulasi, penghilangan dokumen yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Sisem pengendalian pemerintah desa, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa di terapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah sistem pengendalian intern

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya

Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menghendaki dalam pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali serta efisien dan efektif, untuk itu diperlukan adanya sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, pengamanan aset desa dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu: Lingkungan pengendalian; Penilaian resiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lain. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam pemerintah desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian dalam Pasal 112 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan yang ada dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih berada dalam kisaran pengawasan eksternal dan juga belum menyentuh mekanisme pengendalian internal sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa pengatur dan penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk mengelola transparansi keuangan negara adalah kepala pemerintahan. Dan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar berada di tangan presiden. Karena itu selaku kepala pemerintahan, presiden wajib melaksanakan SPIP di seluruh organisasi pemerintahan.

Sistem yang efisien dan efektif, menjaga harta, dan integritas data hanya dapat dicapai jikalau manajemen membuat sistem pengendalian internal yang baik dan peranan audit internal dapat membantu manajemen dalam mencegah penyimpangan atau fraud. Pengendalian internal yang lemah memungkinkan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Keefektifan pengendalian internal mempunyai

pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

(Andari & Ismatullah, 2019) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh secara parsial terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. Pengendalian internal sangat penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pengendalian internal yang dilakukan secara efektif akan menutup peluang terjadinya kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) untuk melakukan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara menerapkan pengendalian internal yang baik dan kuat. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala oleh seluruh anggota organisasi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut telah mencapai tujuannya. Pengendalian internal juga digunakan sebagai alat proteksi *fraud* saat mengelola dana Desa. Hal tersebut dapat terjadi sebab pengendalian internal yang dijalankan dengan baik akan dapat meminimalisir peluang seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan (Dea, 2021)

Membangun pengendalian intern yang efektif. Terdapat komponen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko. Prosedur pengendalian, pemantauan serta informasi dan komunikasi harus diperbaiki juga dan dinilai, sudahkah bekerja dengan baik. Agar mampu menentukan keputusan juga yang lebih baik guna meningkatkan efisien dan efektifitas. Semakin baik pengendalian internal dalam Desa, maka pengelolaan laporan keuangan akan semakin transparan, sehingga *fraud* akan semakin mudah di cegah. Transparansi merupakan hal yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, wajar, serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

(Julita & Abdullah, 2020) Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. Jika pemerintah desa tidak menerapkan sistem transparansi maka akan terjadi penyelewangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif deskriptif menggunakan kuesioner. Dimana data yang dikumpulkan adalah Pengaruh Pengendalian Internal dan Trasparansi Terhadap Pencegahan pada Kecurangan Laporan Keuangan (*Studi Di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una*)

Metode penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif biasanya dilakukan pada penelitian inferensial dan berdasar pada kesimpulan dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian di Desa sekecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una. Data yang digunakan merupakan data primer dengan pembagian kuesioner,

Setelah melakukan uji instrument, peneliti melakukan teknik pembagian kuesioner menggunakan metode penyebaran secara langsung terhadap Kepala desa dan BPD di desa-desa kecamatan Ampana Tete, tahun 2023. Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 39 responden. Kuesioner yang disebarakan ditunggu oleh peneliti sehinga kuesioner yang kembali sebanyak 39 kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 yaitu sebagian Perangkat Desa Yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua BPD Desa di desa-desa sekecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-Una. Dan sampel Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 39 sampel. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada salah satu responden yang menyebabkan kuesioner yang terisi hanya 39 kuesioner, dengan pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Penyebaran kuesioner dilakukan selama 6 hari. Langkah peneliti melakukan penyebaran 39 kuesioner dengan cara menemui langsung kepada responden yaitu Kepala desa dan ketua BPD. Secara umum, Kepala desa dan ketua BPD sekecamatan Ampana Tete memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain jenis kelamin, usia responden, tingkat pendidikan, jabatan/pangkat dan lama bekerja. Oleh karena itu, setiap identitas pribadi responden harus dikelompokkan.

Berdasarkan jenis kelamin responden. Terdapat 33 responden atau sejumlah 85% berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 6 responden atau sejumlah 15% berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dijumpai peneliti di dominasi oleh Laki-laki.

Berdasarkan Usia yang dikumpulkan sebanyak 39 responden pada Kantor Desa Sekecamatan Ampana Tete yaitu responden yang berusia <39 tahun sebanyak 13 orang (33%), yang berusia 40-49 tahun sebanyak 22 orang (57%), dan yang berusia 50-58 tahun sebanyak 4 orang (10%). Temuan menunjukkan bahwa tingkat usia responden paling banyak yaitu tingkat usia responden yang berusia 40-49 tahun sebanyak 22 orang (57%).

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang paling banyak ditemui peneliti yakni yang menempuh pendidikan terakhir pada jenjang SMA sebanyak 36 responden atau sebesar 92% dan sisanya menempuh pendidikan terakhir pada jenjang S1 atau sebanyak 3 responden atau sebesar 8%.

Berdasarkan Jabatan/pangkat dapat dilihat bahwa jumlah responden yang paling banyak ditemui peneliti yakni yang menjabat sebagai Ketua BPD dengan jumlah responden 20 atau sebesar 92% dan sisanya diisi Kepala Desa sebanyak 19 responden atau sebesar 49%.

Berdasarkan Lama masa bekerja dapat dilihat bahwa jumlah responden yang paling banyak ditemui peneliti dengan lama usaha 1-5 tahun sebanyak 12 responden atau sebesar 31%.

1. Pengaruh Pengendalian Inernal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian pada uji t, t-hitung 2.222 > t-tabel 1,688 dan nilai signifikansi 0,033 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian

Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan Keuangan. Sehingga H1 diterima.

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang termasuk di dalamnya kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen (Novandalina et al., 2021). Pengendalian internal adalah sebuah proses yang termasuk di dalamnya kegiatan operasional organisasi dan merupakan 9 bagian integral dari kegiatan manajemen. Jadi apabila terdapat Pengendalian dalam suatu Instansi atau organisasi maka akan mencegah terjadinya kecurangan. Semakin tinggi tingkat Pengendalian Internal maka semakin rendah tingkat kecurangan yang akan terjadi.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan hasil penelitian Wahyudi. (2021) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Yang berarti semakin baik sistem pengendalian internal maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin sedikit. Sistem pengendalian internal yang memadai mampu untuk meningkatkan upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-Una. Hasil penelitian yang ada menunjukkan sistem pengendalian internal di 20 desa yang berada di Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una adalah kuat.

Hal ini sejalan dengan teori Administrasi publik ialah teori yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Dengan adanya Pengendalian internal di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete, maka proses, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh aparat desa dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh t -hitung $4.852 > t$ -tabel $1,688$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (Y) di Desa sekecamatan Ampana Tete. Sehingga H2 diterima.

Transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan. Transparansi diperlukan agar adanya keterbukaan kepada masyarakat untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Transparansi juga berperan agar ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa. Transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian (Latrini, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian (Latrini, 2017) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dengan pengelolaan dana desa dan hubungannya sangat kuat.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yaitu terdapat hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah) dimana pemerintah harus bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Transparansi sangat berpengaruh dalam Pencegahan kecurangan di Desa sekecamatan Ampana Tete, dengan adanya transparansi Desa-Desa di Kecamatan Ampana Tete dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan, sehingga akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut telah tercapai tujuannya secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan yang handal sesuai aturan yang berlaku.

3. Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian pada uji F, diperoleh hasil F-hitung lebih besar dari F-tabel ($17.543 > 3,82$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan di Desa sekecamatan Ampana Tete, sehingga H3 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan pada laporan keuangan di Desa sekecamatan Ampana Tete.

Hal ini dikarenakan pengendalian internal berfungsi untuk meminimalkan risiko dan melindungi aset, memastikan keakuratan catatan, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Yang berarti semakin baik sistem pengendalian internal yang ada di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete, maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan semakin sedikit. Dan Transparansi juga berperan penting, agar ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa. Transparansi berjalan dengan baik terhadap pengelolaan dana desa karena adanya informasi yang dapat diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan Keuangan DI Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete. Dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,033 < 0,05$ atau hipotesis diterima. Sehingga, semakin tinggi Pengendalian Internal, maka akan semakin tinggi tingkat Pencegahan Kecurangan kecurangan di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete. Dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (Y) di Desa sekecamatan Ampana Tete. Dibuktikan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ atau hipotesis diterima. Sehingga, semakin tinggi tingkat Transparansi yang dimiliki maka akan semakin tinggi tingkat Pencegahan Kecurangan kecurangan di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete. Dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan di Desa sekecamatan Ampana Tete,. Dibuktikan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ atau hipotesis diterima. Sehingga, semakin tinggi tingkat Pengendalian Internal dan Transparansi, maka

semakin tinggi tingkat Pencegahan kecurangan di Desa-Desa Kecamatan Ampana Tete.

Referensi

- Andari, L., & Ismatullah, I. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada Cv. Agung Mas Motor Kota Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 8(15), 75–81.
- Ayu, A. (2021). *Pengaruh Internal Control Dan Internal Audit Terhadap Upaya Meminimalisasi Fraud Dengan Akuntabilitas Keuangan Sebagai 4*, 196–211. [Http://Repository.Stei.Ac.Id/Id/Eprint/5597%0ahttp://Repository.Stei.Ac.Id/5597/2/Bab 2.Pdf](http://Repository.Stei.Ac.Id/Id/Eprint/5597%0ahttp://Repository.Stei.Ac.Id/5597/2/Bab%202.Pdf)
- Budiman, M. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, Risk Based Audit, Komite Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan. *Tesis*.
- Dea, A. F. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negri Sunan Ampel*, 11, 33–42. [Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/S1ak/Article/View/25335%0a](https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/S1ak/Article/View/25335%0a)
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221. [Https://Doi.Org/10.24815/Jimeka.V5i2.15556](https://Doi.Org/10.24815/Jimeka.V5i2.15556)
- Novandalina, A., Sarbullah, S., & ... (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Anti-Fraud Awareness Dan Asimetri Informasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Bca *Seminar Nasional \& Http://Prosiding.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Prosenas/Article/View/115*
- Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro, G. De N. J., Palmeira, G., Riet-Correa, F., Moojen, V., Roehe, P. M., Weiblen, R., Batista, J. S., Bezerra, F. S. B., Lira, R. A., Carvalho, J. R. G., Neto, A. M. R., Petri, A. A., Teixeira, M. M. G., Molossi, F. A., De Cecco, B. S., Henker, L. C., Vargas, T. P., Lorenzetti, M. P., Bianchi, M. V., ... Alfieri, A. A. (2021)..Pdf
- Silmi. (2017). Bab Iii Metoda Penelitian 3.1. *Bab Iii Metoda Penelitian, Bab Iii Me*, 1–9.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. [Https://Doi.Org/10.36407/Jrmb.V6i1.315](https://Doi.Org/10.36407/Jrmb.V6i1.315)
- Supriyono, R.A. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Ugm Press, 2018
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Penerbit Pt.Pustaka Indonesia Press